

**CARA MEMBUKTIKAN TERJADINYA KERUGIAN IMMATERIL
DAN KRITERIA DALAM MENENTUKAN BESARNYA GANTI
RUGI TERHADAP KERUGIAN DALAM PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
menempuh ujian sarjana hukum**

Oleh:

Didik Ismail

NIM: 502011164

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2015

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : CARA MEMBUKTIKAN TERJADINYA KERUGIAN
IMMATERIL DAN KRITERIA DALAM MENENTUKAN
BESARNYA GANTI RUGI TERHADAP KERUGIAN
DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**



**Nama : Didik Ismail
NIM : 502011164
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata**


Pembimbing

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH 

Palembang, Januari 2016

DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum 

Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M. Hum 

: 2. Burhanuddin, SH., MH 

**DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M. Hum
NBM/NIDN: 791348/0006046009

MOTTO : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berkata adil dan berbuat kebajikan, member bantuan kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

(QS: An-Nahl: 90)

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ♥ Allah SWT.
- ♥ Bapak (Rumlan Parjani) dan Mamak (Umiyah).
- ♥ Saudaraku Sumtyarsih S.Kep, Musowimin, Mursalin, M. Sidik, Yuli Rahmanita, Renny, Ica Agusti S, Pd, dan Kedua adikku M. Bayu Aqtus Baroqah dan M. Ricat Egimo.
- ♥ Keponakanku Meisya, Unggul, Nadine, Nanda, Aisyah
- ♥ Wanita yang ada di sampingku (Ega Mawarni, SH).
- ♥ Sahabat-sahabat terbaikku, (Tolep, Anton, Reffy, Agung, Nico, Wahyu, Sigit, Firdaus, Haidar, Rafsan, Jatun, Pander, Waslam, Bagus, Gradi, Septian, Anjar, Kardi, Sandes, Efran, Dani, Yudi).
- ♥ Teman-teman Angkatan 2011, KKN Posko 145, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
- ♥ Almamaterku yang Aku banggakan.

Judul Skripsi : CARA MEMBUKTIKAN TERJADINYA KERUGIAN IMMATERIL DAN KRITERIA DALAM MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI TERHADAP KERUGIAN DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

**Penulis,
Didik Ismail**

**Pembimbing,
Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

A B S T R A K

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana cara membuktikan terjadi kerugian immaterial dalam perbuatan melanggar hukum ?
2. Bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immaterial dalam perbuatan melanggar hukum ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan cara membuktikan terjadinya kerugian immaterial dan kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, maka jenis penelitiannya adalah penelitian *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang berhubungan dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Cara membuktikan terjadi kerugian immaterial dalam perbuatan melanggar hukum adalah: dengan cara melihat dari adanya hubungan kausal antara kesalahan dan menimbulkan kerugian . Bersumber pada semua unsur-unsur yang dilakukan oleh pelaku antara lain penggugat harus membuktikan adanya kerugian dan kesalahan pelaku, karena gugatan berdasarkan atas perbuatan melanggar hukum, penggugat harus membuktikan gugatannya.
2. Kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immaterial dalam perbuatan melanggar hukum adalah: pada hakikatnya didasarkan atas kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Artinya besarnya ganti rugi tersebut diserahkan kepada hakim yang memeriksa perbuatan melanggar hukum tersebut.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“CARA MEMBUKTIKAN TERJADINYA KERUGIAN IMMATERIL DAN KERITERIA DALAM MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI TERHADAP KERUGIAN DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Abid Djazuli, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhamadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku ketua Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Heni Marlina, SH., MH, selaku pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, Terkasih serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang. ~

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2015

Penulis

Didik Ismail

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum.....	10
B. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum.....	14
C. Macam-macam Kerugian.....	25
D. Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melanggar Hukum Orang lain.....	27

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Cara Membuktikan Terjadinya Kerugian Immateril	
Dalam Perbuatan Melanggar Hukum.....	32
B. Kriteria Menentukan Besarnya Ganti Rugi Terhadap	
Kerugian Immateril Dalam Perbuatan	
Melanggar Hukum.....	38

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran-saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang tidak hanya bersamaan, akan tetapi juga kadangkala dapat bertentangan yang satu dengan yang lain. Hal ini dapatlah di ketahui bahwa orang yang hidup dalam masyarakat di satu pihak berusaha untuk melindungi kepentingannya masing-masing terhadap kerugian yang timbul, sedangkan di lain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong-menolong dalam mengejar kepentingan bersama.

Dalam usaha melindungi kepentingan masing-masing dan menjaga kepentingan bersama telah diadakan suatu aturan yang dapat menjadi pedoman atau patokan bagi tingkah laku tiap-tiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat, aturan-aturan ini mengharuskan setiap individu untuk bertindak dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga kepentingan-kepentingan individu yang lain sedapat mungkin dapat dipelihara dan dilindungi.

Namun demikian meskipun ada aturan-aturan yang mengatur tingkah laku individu-individu di dalam pergaulan bermasyarakat akan tetapi seringkali dijumpai pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan individu yang semestinya harus dihormati.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan individu ini akan mengakibatkan rasa kurang tentram di dalam pribadi masing-masing dan akan

menimbulkan kegoncangan ini dalam pergaulan bermasyarakat, seperti: seluruh bidang hukum seperti:

- Dalam hukum tata negara ataupun hukum administrasi negara disebut sengketa tata usaha
- Dalam hukum pidana disebut tindak pidana atau delik
- Dalam hukum perdata disebut perbuatan melanggar hukum.¹

Hal ini perlu diingat bahwa salah satu dari suatu tujuan perbuatan hukum adalah untuk mengadakan keseimbangan dan kesebandingan dengan hidup lahir maupun bathin dalam masyarakat serupaa dengan suatu neraca yang harus dan dapat dikatakan bahwa keselamatan dalam masyarakat itu bermanfaat. Keberadaan hukum yang mengatur dan menciptakan berbagai hubungan-hubungan tertentu, tidak tertutup kemungkinan untuk timbulnya perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum.

Perbuatan melanggar hukum inilah yang mengakibatkan kegoncanga di dalam pergaulan hidup masyarakat yang dapat mengenai berbagai kepentingan anggota masyarakat tersebut. Seperti: harta benda, tubuh, jiwa dan kehormatan manusia.

Kepentingan-kepentingan ini semua dirusak oleh suatu perbuatan melanggar hukum yang kadang-kadang menimbulkan kerugian orang lain, maka pihak yang menimbulkan kerugian tersebut dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal menimbulkan ganti kerugian tidak dapat diputuskan dengan begitu saja, tetapi segala sesuatunya aharus melalui prosedur

¹AB. Loebis, *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum Dan Penguasa*, Liberty, Cet ke VII, Yogyakarta, 2007, hal. 30

yang telah digariskan baik secara hukum maupun secara adat berdasarkan keputusan dari masing-masing pihak, yang tentunya menggaris bawahi rasa keadilan.

Sebagaimana diketahui perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, tidak saja terjadi akibat dari perbuatan yang bersangkutan, tetapi juga dapat ditimbulkan oleh perbuatan orang lain yang dalam perlindungan. Oleh karena itu dalam menentukan perbuatan melanggar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dituntut dengan ganti-rugi maka perbuatan itu sendiri harus memenuhi unsur-unsur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat diketahui pihak mana yang ikut bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkannya.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang oleh karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".²

Bunyi Pasal tersebut tidak kita tidak menjelaskan berapa besar ganti kerugian, hal ini diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut, namun yang dapat dijadikan sandaran yakni putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No. 610.k/Sip/1968, bahwa: hakim berwenang untuk menetapkan seberapa pantasnya harus di bayar kerugian tersebut. "Dengan demikian maka

²MA. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Praja Paramita, Cet. VI, Jakarta, 1992, hal. 74

masalah ganti kerugian merupakan hal yang penting dalam kasus perbuatan melanggar hukum tidak hanya menimbulkan dari kerugian Immateriil”.³

Dengan dasar mengingat kerugian immaterial tidak terletak dalam bidang harta kekayaan, seperti: jasmani, rohani, harta benda, dan kehormatan manusia. Kerugian Immateriil ini merupakan kerugian yang diderita seorang yang mungkin timbul rasa sakit, takut dan kehilangan kesenangan hidup. Kerugian Immateriil ini merupakan kerugian yang tidak dinilai dengan uang, karena kerugian tersebut merupakan suatu penderitaan batin, dan penderitaan ini sangat sulit untuk dinilai dengan uang, kerugian yang merupakan suatu penderitaan batin adalah memuliahkan kepada keadaan semula. Jadi pada setiap perbuatan melanggar hukum, kepada si pelaku dapat dipertanggungjawabkan kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil.

Bila kerugian Immateriil tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka akan menimbulkan suatu keadaan dimana keseimbangan masyarakat akan terganggu, dan oleh karenanya harus dipulihkan. Sebagai contoh, dalam tindakan penghinaan yang menimbulkan kerugian pada diri seseorang dapat dituntut ganti-rugi adalah pengganti kerugian sebagai pemulihan nama baik seseorang. Akan tetapi untuk mendapatkan penggantian tersebut adalah sulit, apalagi pelanggar tidak mau memulihkan, maka pihak yang merasa telah dirugikan pada umumnya tidak boleh memaksakan sendiri, tetapi hendaknya melalui jalur hukum tertentu, sebab sudah merupakan prinsip bahwa pelaksana hukum terhadap pelanggaran hukum, berada

³R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Cet. VI, Bandung, 1999, hal. 23

ditangan hakim dan tidak diperkenankan dilakukan oleh penderita sendiri (*eigenrechtig*).

Dengan demikian hakimlah yang diberi wewenang dengan menerapkan beberapa penyesuaian, keahlian untuk mengganti kerugian dalam hal ini hakim menegakkan prinsip yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum, karena hukum yang menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara teratur dengan jalan mengadakan keserasian diantara berbagai kepentingan-kepentingan, ini berarti seseorang tidak bisa berbuat sesuka hati di dalam masyarakat terhadap orang lain, tanpa mematuhi norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat, misalnya merusak barang oranglain, mengambil barang orang lain dan sebagainya. Oleh karena itu saetiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan ganti rugi sebagai kerugian yang benar-benar diderita, sebab hukum sudah mengatur bagi pihak yang merasa telah dirugikan dapat menuntut kerugian tersebut terhadap pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.

Dengan demikian perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku karena kesalahan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: "CARA MEMBUKTIKAN TERJADI KERUGIAN IMMATERIIL DAN KRITERIA MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI TERHADAP KERUGIAN DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM"

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara membuktikan terjadi kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum ?
2. Bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada cara membuktikan terjadinya kerugian immateriil dan kriteria dalam menentukan besarnya ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana cara membuktikan terjadi kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan cara membuktikan terjadinya kerugian immateriil dan criteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) yang bertumpu pada data sekunder karena itu tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi

mengenai kelengkapan, kejelasan, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian perbuatan melanggar hukum, unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, macam-macam kerugian, pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum orang lain.

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

- Bab. III. Pembahasan yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimana cara membuktikan terjadi kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum, dan juga mengenai bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Di dalam pergaulan hidup sehari-hari setiap anggota masyarakat tentunya mempunyai kepentingan masing-masing dan setiap anggota masyarakat mengharapkan agar supaya setiap kepentingan tersebut dapat dilindungi dan dipelihara agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam rangka memperoleh serta menjaga kepentingan tersebut baik disadari ataupun tanpa disadari kadang-kadang terjadi bentrokan antara kepentingan anggota masyarakat yang satu dengan kepentingan di dalam masyarakat yang lain, yang kadang-kadang merupakan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kepentingan.

Perbuatan melanggar hukum adalah terjemahan dari bahasa Belanda "*Onrechtmatige Daad*" istilah perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Undang-undang tidak memberikan defenisi mengenai apa yang dikatakan perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 KUH Perdata hanya memberikan suatu perumusan dari perbuatan melanggar hukum tersebut yang mengatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

Dengan melihat perumusan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, tidak memberikan suatu penjelasan apa, bagaimana dan sampai dimana sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum, yang dapat

diminata pertanggung jawaban kepada pelaku yang telah berbuat itu, semuanya diserahkan pada ilmu pengetahuan dan yurisprudensi.

Perbuatan melanggar hukum apabila dilihat dalam sistematika KUH Perdata terdapat di dalam Buku III Bab ke tiga yang mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan bersumber pada ketentuan undang-undang.

Perlu juga dijelaskan di sini bahwa ketentuan tentang perbuatan melanggar hukum ini tidak dimasukkan dalam bab yang mengatur tentang perikatan yang lahir karena adanya suatu perjanjian, karena perbuatan melanggar hukum tidak mengandung unsur janji.⁵ Hal ini dapat dilihat seseorang tidak akan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian apabila dirinya akan dibebankan dengan kewajiban yang bertanggung jawaban bertentangan langsung dengan kemauan sendiri.

Wirjono Prodjodikoro memberikan istilah perbuatan melanggar hukum dalam pengertian tidak sempit, perbuatan melanggar hukum tidak hanya perbuatan secara langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari pada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung juga melanggar hukum. yang dimaksud dengan peraturan lain yaitu peraturan dilapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun.⁶

Dalam hal pengertian perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud oleh Wirjono prodjodikoro di atas, apabila diterapkann ke dalam ruang lingkup masyarakat hukum adat Indonesia tidak akan mengalami kesulitan karena dalam hukum adat terdapat persamaan corak antara peraturan-peraturan hukum, di satu

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet IX, Sumur, Bandung, 1996, hal. 8

⁶*Ibid*, hal. 12

pihak dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun di lain pihak. Ketentuan dalam lapangan keagamaan, kesusilaan dan sopan santun tidak dimuat dalam suatu undang-undang.⁷

Berbeda dengan pengertian perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, tunduk pada ketentuan yang berlaku di dalam KUH Perdata. Bahwa pengertian perbuatan melanggar hukum diartikan secara sempit adalah perbuatan melanggar hukum suatu aturan atau perbuatan melanggar hukum pada hak orang lain atau kewajiban sendiri seperti yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi harus ada larangan undang-undang untuk menentukan apakah suatu perbuatan melanggar hukum atau tidak. Jadi hukum disamakan dengan undang-undang yang tertulis.⁸ Di sini jelas terlihat bahwa hukum yang bersifat tertulis ini mempunyai pengertian yang sempit, karenanya perbuatan yang terjadi dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar hukum, bila perbuatan tersebut telah melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang. Suatu perbuatan walaupun tidak melanggar undang-undang, tetapi telah merugikan sekelompok masyarakat maka tidak dapat disebut sebagai perbuatan melanggar hukum, akibat hal tersebut kurang memuaskan keinginan masyarakat, sebab sering terjadi perbuatan-perbuatan yang dirugikan tetapi orang yang terkena akibat perbuatan itu tidak dapat dituntut ganti-rugi karena undang-undang, tidak ada larangan tertentu yang tertulis menyangkut perbuatan tersebut.

Dalam KUH Perdata, Pasal 1365 ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang.

⁷*Ibid*, hal. 13

⁸MA. Moegni Djodirdjo, *Op. Cit*, hal 14

Yurisprudensi mengenai ini dikenal dengan nama *Arrest Lindenbaum Cohen* (tahun 1919). Sebelum sampai kepada arrest ini, maka terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat apakah yang harus ada untuk menentukan perbuatan melanggar hukum itu ada atau tidak. Syarat-syarat tersebut ialah:⁹

- a. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
- c. Ada kerugian.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
- e. Ada kesalahan (*schuld*).

Di dalam sejarah perundang-undangan hukum perdata. Pengertian hukum yang terkandung Pasal 1365 KUH Perdata itu mengalami perubahan dengan adanya *Arrest Lindenbaum Cohen* tahun 1919 H.R 31 Jan. Hoetink Nomor 110. sebelum tahun 1919 maka arti hukum di dalam Pasal 1365 adalah sangat sempit. Di dalam *Arrest Jufrouw Zuthen*, hukum diartikan sempit, yaitu undang-undang.

Peristiwanya sebagai berikut:

Di dalam sebuah gudang terdapat 1 (satu) saluran air yang sewaktu-waktu dapat meledak. Keran utama dari saluran itu, berada ditingkat atas gudang itu. Tetapi penghuninya tidak mau menutup keran tersebut sehingga gudang banjir air. Ketikam penghuni itu digugat untuk ganti rugi, ia membela diri bahwa undang-undang tidak mewajibkannya untuk menutup keran utama, sehingga ia tidak dapat dikatakan melawan hukum dan pendirian ini dibenarkan Mahkamah Agung Negeri Belanda (HR.10. Juni 1910. Hoetink Nomor 108).¹⁰

Pada tahun 1919 dalam *Lindenbaum Cohen Arrest*, HR, mengubah pendiriannya, dengan memberikan arti yang luas kepada hukum yang ditafsirkan

⁹Mariam Darus Badruzaman. Dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ciatra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 106-107

¹⁰*Ibid*, hal. 107

dengan hukum mencakup undang-undang dan hukum yang tidak tertulis, seperti kesusilaan, kapatutan yang terdapat di dalam lalu lintas masyarakat.

Sejak tahun itu, perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam lalu lintas masyarakat.

Dengan demikian, semua norma lalu lintas masyarakat, yang tidak termasuk di dalam undang-undang, semenjak itu ditempatkan di bawah sanksi hukum perdata. Unsur kesalahan yang dimaksud ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu bahwa si pembuat pada umumnya harus ada pertanggung jawabannya, yaitu ia menginsyafi akibat adari perbuatannya (*toerekeningsvaatbaar*).

B. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum ini di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang oleh karena itu salahnya menerbitkan kerugian, dapat mengganti kerugian tersebut".

Dari bunyi Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa untuk melakukan gugatan dalam perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar hukum.

- b. Harus ada kesalahan.
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
- d. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.

Ad.a. Perbuatan Yang Melanggar Hukum

Pengertian perbuatan melanggar hukum meliputi perbuatan dalam arti positif dan dalam arti negatif.¹¹ Perbuatan yang dikatakan bersifat positif adalah perbuatan yang bersifat “melakukan atau bertindak”, sedangkan suatu perbuatan dikatakan bersifat negatif adalah perbuatan yang berupa suatu keharusan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbuatana negatif meliputi hal orang yang dengan berdiam saja dapat dikatakan melanggar hukum yaitu dalam hal orang tersebut menurutnya harus bertindak.¹²

Walaupun perbuatan itu negatif, namun menurut Wirjono Prodjodikoro dapat juga dikatakan aktif seperti halnya dikatakan beliau, perbuatan negatif yang dimaksud itu bersifat “aktif” ini harus diartikan bahwa orang yang diam saja baru dapat dikatakan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kalau ia sadar bahwa ia dengan berdiam saja adalah melanggar hukum.¹³ Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu melainkan pikiran dan perasaan.

Sedangkan MA.Moegni Djojodirdjo dalam bukunya berjudul perbuatan melanggar hukum, menggunakan istilah aktif dan pasif hal ini dapat dilihat:

Kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan maka nampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melanggar” tersebut. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja diam saja, sedangkan ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain. Atau

¹¹MA. Moegni Djojodirdjo, *Op. Cit*, hal. 76

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hal. 8

¹³*Ibid*

dengan perkataan lain bilamana ia enggan melakukan keharusan sudah melanggar sesuatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka ia telah “melanggar” tanpa menggerakkan badan. Inilah sifat dari pada lazimnya disebut “melanggar”.¹⁴

Dengan demikian seseorang oleh sesuatu ketetapan diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu akan tetapi ternyata orang tersebut tidak melakukan perbuatan itu, maka keadaan demikian masuk perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Pengertian perbuatan melanggar hukum sebelum tanggal 31 Januari 1919 ditafsirkan secara sempit yaitu melanggar hukum merupakan sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri. Jadi perbuatan tersebut harus melanggar hak subjektif orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri, yang telah diatur di dalam undang-undang atau dengan kata lain melanggar hukum ditafsirkan sebagai melanggar undang-undang. Hal yang demikian ini kurang memuaskan karena kurang memenuhi keinginan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka timbul suatu pandangan baru yang dimaksud untuk menampung keadaan yang tidak memuaskan. Pandangan baru ini dengan adanya keputusan *Hoge Raad* tanggal 13 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melanggar hukum ini ditafsirkan secara luas, yaitu suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mengurangi hak pihak orang lain.

Apabila penafsiran *Hoge Raad* ini ditelaah lebih lanjut, maka pengertian ini mengandung beberapa kesimpulan, yaitu:

¹⁴M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op. Cit*, hal. 13

- a. Unsur perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang mengurangi hak pihak atau bertentangan dengan kewajiban pribadi menurut hukum dapat ditemukan dasarnya dalam hukum positif.
- b. Unsur perbuatan yang melanggar adat kesopanan yang baik adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tata-kesopanan.
- c. Unsur perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban bertindak hati-hati, yang berlaku dalam masyarakat khalayak ramai terhadap pihak lain atau milik pihak lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan tindak tanduk ketentuan-ketentuan saling menghormati, yang terjadi pedoman hidup dan penghayatan hidup dari masyarakat dalam tata pergaulan satu sama lain.¹⁵

Dengan demikian putusan *Hoge Raad* tersebut telah merubah sejarah hukum di negeri Belanda, karena interpretasi dari Pasal 1401 BW Belanda itu oleh *Hoge Raad* diberikan pengertian secara luas. Dengan putusan itu kewajiban yang dahulu terletak di bidang moral telah dimasukkan ke dalam lingkungan hukum.

Ad.b. Harus Ada Kesalahan

Suatu perbuatan melanggar hukum harus ada kesalahan, dan kesalahan itu harus dibuktikan untuk menuntut ganti-kerugian. Dalam suatu perbuatan melanggar hukum telah ditentukan adanya suatu hubungan sebab akibat antara perbuatan disatu pihak dengan akibat yang lain timbul dari perbuatan tersebut di lain pihak. Maka timbul suatu persamaan apakah disebabkan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atau tidak.

Masalah kesalahan ini merupakan suatu hubungan kerohanian antara pikiran dan perasaan dari pelaku atas perbuatan melanggar hukum di satu pihak dengan merusak atau melanggar dari kepentingan di lain pihak. Kalau seseorang pada waktu melakukan perbuatan melanggar hukum menyadari atau tahu betul bahwa perbuatan itupun akan menimbulkan suatu pelanggaran terhadap suatu

¹⁵Achmad Ichsan, *Hukum Perdata I.B*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1997, hal. 253

kepentingan tertentu, maka dapat dikatakan bahwa pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan tersebut.

Pengertian kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata dapat ditafsirkan secara luas, yaitu meliputi kesengajaan dan berkurang hati-hati, tetapi pasal tersebut tidak mengadakan keduanya, melainkan hanya mengatakan bahwa harus ada kesalahan di pihak pelaku perbuatan melanggar hukum agar pembuat dapat dipertanggungjawabkan atau diwajibkan untuk membayar ganti-kerugian.

Berhubungan dengan hal ini, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam KUH Perdata tidak perlu dihiraukan, apakah ada kesengajaan dan berkurang hati-hati.¹⁶ Karena keduanya merupakan unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Sehubungan dengan perlunya menemukan unsur kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, pada umumnya dapat diterima suatu anggapan bahwa dengan melakukan perbuatan melanggar hukum orang sudah mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut,¹⁷ dengan demikian sesungguhnya setiap perbuatan melanggar hukum pasti mengandung di dalamnya unsur kesalahan. Walau demikian kenyataan hukum menunjukkan bahwa ada saat-saat keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, meskipun tindakan tersebut secara objektif adalah suatu tindakan yang termasuk dalam perbuatan melanggar hukum. misalnya

¹⁶*Ibid*, hal. 30

¹⁷Gunawan Wijaya Dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 139

seorang anak yang terganggu jiwanya yang telah mengemudi mobil milik orang lain yang menyebabkan kerugian pada mobil tersebut.

Menurut Achmad Ichsan untuk menentukan seseorang beresalah atau tidak akan perbuatan melanggar hukum adalah merupakan persoalan delik.

Untuk itu ada beberapa teori yang dapat dilihat adalah:

1. Kesalahan dalam arti objektif (*objectieve schuld*),
2. Kealahan dalam arti subjektif (*subjektieve schuld*).¹⁸

Ad. 1. Kesalahan dalam arti objektif

Seseorang dianggap melakukan kesalahan dalam arti objektif, apabila ia bertindak lain dari pada seharusnya dilakukan oleh orang-orang lain dalam keadaan itu dalam pergaulan masyarakat. Ukuran objektif ini tidak dalam arti umum, akan tetapi menurut keadaan lingkungan dalam masyarakat dimana orang tersebut berada dalam arti apakah tindakan yang dilakukan dapat dianggap sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh orang normal dalam keadaan itu di lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Ad.2. Kesalahan dalam arti subjektif

Kesalahan dalam arti subjektif, ini dilihat kepada orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu, apakah orang itu menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Untuk menentukan dapat dipertanggungjawabkan adalah melihat kepada psikhis dari orang tersebut apakah normal atau tidak. Karena orang tahu apa yang dilakukan, tidak diwajibkan membayar ganti kerugian. Misalnya anak kecil atau orang gila. Akan tetapi hal dapat

¹⁸Achmad Ichsan, *Op. Cit*, hal. 254

dipertanggungjawabkan bagi mereka yang masih dalam keadaan pengawasan. Pertanggungjawaban ini merupakan pertanggungjawaban tidak langsung dari seseorang karena salahnya orang-orang berada dalam pengawasan, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut: “seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang oleh barang-barangnya yang berada di bawah pengawasan.

Adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan pada unsur kesalahan, adalah dalam hal pembuat memaksa. Misalnya, dalam keadaan bahaya merusak jendela tetangga untuk meloloskan diri dari kebakaran.

Jadi seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum karena kesalahan, baik disengaja ataupun kurang hati-hati dan ia tidak dalam keadaan memaksa atau dapat menyadari nilai dari pada perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka ia wajib membayar ganti kerugian. Sedangkan kalau seseorang karena kesalahannya menimbulkan kerugian kepada pihak lain, tetapi ia dalam keadaan memaksa atau dapat menyadari nilai dari perbuatan yang berarti ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak wajib ia mendapat ganti kerugian.

Ad. c. Harus Ada Kerugian Yang Ditimbulkan

Dalam unsur perbuatan melanggar hukum ditentukan bahwa perbuatan melanggar hukum itu memenuhi syarat kerugian pada pihak lain. Perbuatan melanggar hukum di lakukan oleh seseorang dari orang lain merupakan suatu

pelanggaran terhadap kepentingan tertentu dari seseorang. Pada umumnya perbuatan melanggar hukum itu selalu menimbulkan kerugian pada pihak lain dan kerugian itu tidak mungkin bersifat *materiil*, tetapi juga menimbulkan kerugian yang bersifat *immateriil*.

Dengan kata lain tiap perbuatan melanggar hukum tidak mengakibatkan kerugian *materiil* saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian immaterial (moril) yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Kalau kita berbicara tentang kerugian yang pertama kita juga ingat adalah kerugian *materiil*. Kalau seseorang karena perbuatan melanggar hukum dari pihak pihak lainnya, maka menderita kerugian materiil pada umumnya berupa kerugian harta kekayaan, misalnya perusakan atau menghancurkan barang-barang yang yang harus diperbaiki. Lain halnya dengan jika seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian immaterial, maka kerugian yang akan menimbulkan hal tersebut sukar di nilai dengan uang. Misalnya berupa penghinaan di muka umum sehingga orang yang di hina itu merasa turun derajatnya. Hal ini dala Pasal 1365 KUH Perdata memungkinkan beradanya tuntutan penggantian kerugian secara materiil oleh korban, di samping tuntutan perbaikan nama orang yang di hina, pasal ini juga dapat memberikan petunjuk yang sangat relatif, adalah di mana hakim dalam memeriksa perkara tersebut untuk menentukan penggantian kerugian yang harus di bayar tergantung pada berat dan ringannya penghinaan yang dilakukan kepada kedudukan serta keyakinan kedua belah pihak. Dimana tingkat terkahir tergantung kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Ad.d. Adanya Hubungan Causal Antara Perbuatan Melanggar Hukum

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata bahwa kerugian yang diderita seseorang karena perbuatan melanggar hukum harus merupakan akibat perbuatan melanggar hukum tersebut, maka untuk membuktikan faktor-faktor yang merupakan suatu akibat yang berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang. Perlu juga diketahui bahwa persoalan kausalitas ini tidak di atur dalam undang-undang, sehingga persoalan tersebut penyelesaian diusahakan oleh ilmu pengetahuan hukum. Untuk jelasnya ada sebuah contoh sebagai berikut: A memukul B, karenanya B mendapat luka pada kulitnya yang merupakan luka ringan saja, luka mana umumnya tidak mengakibatkan matinya B, tetapi B membutuhkan pertolongan pada dokter, untuk mana B berjalan kaki menuju ke rumah sakit, tetapi malang nasib bagi B karena di tengah perjalanan B dilanggar mobil C yang menimbulkan luka berat yang menyebabkan B mati seketika.

Di dalam menelaah masalah hubungan sebab akibat ini ada dua teori, yakni:¹⁹

- a. teori *Conditio Sine Qua Non* dari Van Buri, teori ini menyatakan bahwa suatu hal itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada, dengan adanya teori ini mengenal banyak dari satu akibat.
- b. Teori *Adequate Veroorzaking* dari Van Kris teori ini menyatakan bahwa suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *OP. Cit.*, hal. 23

pengalaman manusia dapat dikira-kirakan lebih dahulu, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.

Menurut teori ini dalam hal adanya suatu akibat yang ditimbulkan oleh beberapa sebab-sebab langsung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Dari kedua teori di atas, apabila dikaitkan ke dalam KUH Perdata secara tegas tidak mengatur teori tersebut.

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, maka hakim di Indonesia tidak ada ikatan yang memaksa untuk menuruti salah satu teori persebaban di atas guna menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bilamana kita lihat kasus dengan menggunakan teori "*Conditio Sine Qua Non*" dari Van Buri, maka yang menjadi penyebab kematian B adalah semua faktor yang menimbulkan akibat. Tetapi teori ini dianggap kurang memuaskan, karena terlalu memperluas tanggungjawab orang yang semestinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung karena terlalu luas tanggungjawab terhadap suatu akibat, maka timbul teori "*Adequate Veroorzaking*" dari Van Kriss. Menurut teori ini yang menjadi penyebab dari suatu akibat adalah faktor-faktor yang menurut keadaannya paling mudah menimbulkan akibat.

Jadi tidak semua faktor yang menimbulkan akibat dianggap sebagai penyebab adanya suatu akibat, sehingga teori ini mencoba memperbaiki teori "*Conditio Sine Qua Non*", yaitu dengan berusaha mempersempit pengertian, sebab terbatas faktor yang menimbulkan sebab dari suatu akibat.

Dengan demikian faktor-faktor yang tidak memenuhi persyaratan itu meskipun menimbulkan akibat, tidak dianggap sebagai sebab. Jadi menurut teori ini yang dianggap sebagai penyebab kematian B adalah dilanggar C, itu karena faktor inilah merupakan akibat dari perbuatan yang layak akan timbul sehingga hanya C yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut penulis, kiranya lebih tepat menganggap teori dalam perbuatan melaanggar hukum, jika perbuatan tersebut merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan tersebut, dan kiranya akibat itu menurut pengalaman selayaknya sudah dibayangkan.

Dalam teori "*Adequate Veroorzaking*" terdapat hubungan kausal di dalam perbuatan melanggar hukum, jika kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan yang menurut pengalaman secara layak timbul. Hal ini dapat dilihat seseorang menderita kerugian meskipun dilakukan secara sukarela sebagai salah satu contoh:

Dalam suatu surat kabar telah memberitakan bahwa harga saham-saham akan menurun. Karena hal tersebut seorang pemegang saham akan menurun nilainya, lalu ia menjual saham-saham dengan nilai tidak seimbang. Kemudian ternyata bahwa berita tersebut tidak benar. Pemegang saham telah menderita kerugian itu dengan menuntut ganti kerugian dari perusahaan surat kabar tersebut, dengan alasan bahwa penjualan saham itu atas kemauan sendiri dari pemegang saham, sedanagkan berita yang tidak menguntungkan itu tidak ada hubungan kausal dengan kerugian yang diderita pada diri korban.²⁰

Hoge Raad menganggap antara berita tersebut dengan kerugian pemegang saham tadi ada hubungan kausal, dikarenakan tanpa adanya berita saham,

²⁰R. Setiawan, *Op. Cit.*, hal. 88

pemegang saham tidak mungkin menjual sahamnya, meskipun dilakukan atas kemauan sendiri.

C. Macam-macam Kerugian

Yang dimaksud dengan kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan melanggar hukum. seperti telah dijelaskan bahwa perbuatan melanggar hukum dapat menimbulkan kerugian yang bersifat materiil dan kerugian yang bersifat immaterial. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan mengenai kerugian yang dimaksud.

1. Kerugian Materiil

seperti telah diuraikan di atas bahwa, sebagian dari akibat perbuatan melanggar hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian materiil ini merupakan kerugian harta benda atau harta kekayaan bagi seseorang. Kerugian ini dapat berupa perusakan barang-barang milik seseorang menjadi berkurang sebagai akibat suatu penipuan atau sebagian akibat suatu penggelapan. Semua kerugian tersebut dapat dihitung jumlahnya. Jadi yang dimaksud dengan kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, dan jumlahnya dapat diperkirakan.

2. Kerugian Immateriil

Perbuatan melanggar hukum dapat juga menimbulkan kerugian immaterial. Kerugian yang bersifat itu tidak terletak dalam harta kekayaan seseorang. Pada kerugian tersebut mungkin berupa timbulnya rasa sakit hati,

berkurangnya kesenangan hidup, kehilangan akibat kesenangan kehidupan jasmaniah.

Kerugian yang diderita seseorang mengenai tubuhnya atau jiwa seseorang dapat berupa luka-luka atau cacatnya seseorang adalah merupakan kerugian immaterial. Dengan hal demikian kerugian yang diderita karena perasaan direndahkan kehormatan seseorang, dikarenakan pihak lain menghina nama baik secara lisan ataupun secara tulisan yang mengakibatkan harga diri orang dihina itu merosot dimata khalayak ramai. Di samping itu dilakukan oleh terhadap orang lain dalam menikmati hak milik, dan ini tidak berupa perusakan, tetapi merupakan penghalang orang lain untuk mengecap kenikmatan secara bebas. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan putusan Hoge Raad tanggal 29 Januari 1927.²¹ Misalnya dalam kasus dibawah ini: Kotapraja Tiburg dihukum membayar ganti kerugian kepada pemilik rumah yang berada di pinggir kali Voorste Stroom, hal ini karena pengotoran oleh Kotapraja Timburg menimbulkan bau busuk pada pemilik rumah. Persoalan bukan berkurang harga sewa rumah. Hoge Raad menghukum Kotapraja untuk membayar ganti kerugian atas dasar pertimbangannya termuat dalam pengertian perbuatan melanggar hukum, dimana perbuatan yang ditimbulkan tersebut mengakibatkan kelalaian dan hilangnya kenikmatan atas milik orang lain. Dalam hal ini pemilik rumah tersebut kehilangan hak mendapatkan kenikmatan itu.²² Di sini Hoge Raad berpendapat bahwa kerugian immaterial diderita pemilik rumah, wajib diberikan ganti kerugian oleh Kotapraja. Contoh

²¹AB. Lubis, *Op. Cit.*, hal. 27

²²*Ibid*

lain dapat dilihat putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1937.²³ Penghuni dari sebuah rumah yang terletak berdekatan dengan balai pertemuan mahasiswa di kota Utrecht. Dimana mahasiswa tersebut hampir setiap malam mengadakan pesta, sehingga pemilik rumah dan seluruh keluarganya itu tidak dapat tidur nyenyak/tenteram. Atas dasar kekurangan kenikmatan yang disebabkan perbuatan melanggar hukum, pemilik rumah menuntut ganti kerugian. Jadi Hoge Raad menganggap tuntutan ganti rugi pemilik rumah tersebut atas dasar kehilangan kenikmatan dapat dikabulkan.

D.Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melanggar Hukum Oranga Lain

Seperti telah disebutkan, undang-undang membolehkan dipertanggung jawabkannya pihak atau orang lain atas suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang atau pihak lain. Dengan rumusan umum, Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa: “Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa undang-undang masih tetap mempertahankan tiga unsur yang menjadi dasar berlakunya suatu perbuatan melanggar hukum

²³MA. Moegni Djojodirjo, *Op. Cit*, hal. 41

hukum yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata, yaitu:

1. adanya perbuatan melanggar hukum,
2. perbuatan melanggar hukum tersebut telah menerbitkan kerugian pada orang atau pihak lain,
3. adanya kesalahan, kelalaian atau kurang hati-hatian.

Berbeda dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata, dimana unsur perbuatan melanggar hukum dan unsur kesalahan harus terletak pada diri orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum agar orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara perdata. Dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, unsur perbuatan melanggar hukum dan unsur kesalahan tidak berada pada satu pihak. Menurut rumusan Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, unsur perbuatan melanggar hukum tetap harus ada pada diri orang yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi unsur kesalahan harus ada pada pihak yang harus bertanggungjawab tersebut (yaitu orang tua, wali, guru sekolah, pengelola tempat pemagangan, majikan dan *lastgever*).

Selanjutnya jika diperhatikan ketentuan Pasal 1367 ayat (5) KUH Perdata yang menyatakan: "Tanggungjawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggungjawab itu".

Dari bunyi Pasal 1367 ayat (5) KUH Perdata tersebut menunjukkan pada kita semua bahwa terhadap orang tua, wali, guru sekolah, dan pengelola tempat pemagangan, undang-undang memberikan alasan pemaaf, yang menghapuskan unsur kesalahan dari orang tua, wali, guru sekolah, dan

pengelola tempat pemagangan tersebut, yang mengakibatkan mereka tidak dapat dituntut untuk bertanggungjawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak belum dewasa, murid-murid sekolah dan murid-murid dalam pemagangan tersebut.²⁴

Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa rumusan mengenai kepala tukang dan tukang di sini tidak berada dalam konteks majikan-buruh, melainkan jika kita lihat kembali teks aslinya dalam bahasa Belanda, yang dimaksud dengan tukang adalah *knechts* yang merupakan anak-anak yang bekerja secara magang pada suatu tempat tertentu. Dan yang disebut sebagai kepala tukang ini adalah *werkmeesters*, yang merupakan penanggungjawab atau pengelola dari tempat di mana anak-anak ini bekerja secara magang.²⁵

Selanjutnya dalam kaitannya dengan hubungan hukum guru-murid dan pengelolaan tempat pemagangan-murid yang magang, maka perlu disampaikan bahwa yang dimaksud dengan murid dan murid dalam pemagangan ini adalah mereka yang belum dewasa, oleh karena jika mereka ini telah dewasa, maka mereka tidak lagi berada di bawah pengawasan guru atau pengelola tempat pemagangan ini, dan mereka telah bertanggungjawab penuh atas setiap tindakan dan perbuatannya yang melanggar hukum tersebut.

Di luar mereka tersebut di atas (yaitu yang disebut dalam Pasal 1367 ayat (5) KUH Perdata), dalam kaitannya dengan hubungan majikan-buruh dan *lastgever-lashebber*, maka sesuai dengan konstruksi hukum yang diberikan atas hubungan hukum majikan-buruh, dan *lastgever-lasthebber*, selama dan sepanjang mereka ini yang disebut berlakangan (buruh dan *lasthebber*) melaksanakan

²⁴Gunawan Widjaja Dan Kartini Muljadi, *Op. Cit.*, hal. 160

²⁵*Ibid*

perintah yang diberikan oleh majikan atau *lastgever*, dengan itikad baik, sesuai dengan perintah yang diberikan, maka mereka (majikan dan *lastgever*) inilah yang akan bertanggungjawab atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh buruh dan atau *lasthebber* ini. Jadi tidak dimungkinkan pemberian alasan pembenar atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh buruh atau *lasthebber* ini. Perlu diketahui bahwa, seperti telah disinggung di muka, setiap tindakan perbuatan melanggar hukum pastilah membawa di dalamnya unsur kesalahan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kesalahan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut. Dalam hubungan hukum majikan-buruh dan *lastgever-lasthebber*, meskipun tindakan atau perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan oleh buruh atau *lasthebber*, tetapi mereka melakukannya sebagai orang yang memegang perintah dari majikan atau *lastgever* yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Dalam hal inipun menurut hemat penulis alasan pembenar sebagaimana diberikan dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata tidak selayaknya berlaku bagi mereka ini.

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum majikan-buruh dan *lastgever-lasthebber*, di mana yang disebutkan terakhir ini (buruh dan *lasthebber*) bekerja atas perintah dari mereka yang disebutkan terdahulu (majikan dan *lastgever*) dapat dilihat dari rumusan Pasal 1601a KUH Perdata dan rumusan Pasal 1792 KUH Perdata yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1601a, Perjanjian perburuhan adalah; "Perjanjian dengan mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan dirinya untuk, dibawah perintah pihak yang lain,

majikan, untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Pasal 1792, pemberian kuasa (perintah) adalah: “Suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan (perintah) kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Dari rumusan kedua pasal tersebut di atas, tampak jelas sekali bahwa unsur perintah (*majikan* dan *lastgever*) merupakan suatu hal penting dalam perjanjian kerja (perburuhan) maupun pemberian *last* (kuasa atau perintah). Bahkan dalam ketentuan Pasal 1807 KUH Perdata dikatakan bahwa: “pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnya dari pada itu, selainnya sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas atau diam-diam”.

Dengan demikian jelaslah bahwa setiap tindakan yang dibuat oleh *lasthebber* atas *last* yang diberikan oleh *lastgever*, akan menjadi perikatan (kewajiban) bagi *lastgever*. Perikatan ini tidak hanya perikatan yang lahir dari perjanjian semata-mata melainkan juga lahir dari undang-undang, termasuk didalamnya perbuatan melanggar hukum.

BAB. III

PEMBAHASAN

A. Cara Membuktikan Terjadi Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melanggar Hukum

Dalam membicarakan tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum yaitu menyangkut hak seseorang yang berkurang atau terganggu dapat meliputi berkurangnya kekayaan seseorang, berkurangnya kesenangan hidup, dan juga dapat berupa perbuatan yang merupakan menghalang-halangi orang lain secara bebas.²⁶ Dalam KUH Perdata masalah tuntutan ganti rugi ini diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367 seperti telah diuraikan.

Berdasarkan Pasal tersebut pelaku berkewajiban memberikan ganti kerugian dan bertanggungjawab kepada penderitaaan kerugian karena perbuatan melanggar hukum.²⁷ Dengan demikian kerugian yang dapat dituntut adalah perbuatan seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian pada orang lain, maka untuk membuktikan tentang terjadinya kerugian itu harus ada hubungan langsung atau adanya hubungan causal antara kesalahan dan menimbulkan kerugian. Selanjutnya apakah kerugian pelaku atas perbuatan yang melanggar hukum dapat mengganti kerugian immaterial.

Hoge Raad dalam keputusan tanggal 21 Mei 1943 memungkinkan adanya tuntutan ganti kerugian atas kerugian immaterial. Keputusan tersebut mengatakan

²⁶AB Loebis, *Op. Cit*, hal 35

²⁷*Ibid*

bahwa: “Dalam menilai kerugian disamping kerugiannya mengenai kekayaan dapat juga diperhitungkan tuntutan ganti rugi atas kegembiraan hidup yang sekitarnya dapat diharapkan dinikmati dan atas kesedihan yang disebabkan karena luka-luka pada badannya”²⁸

Dalam Pasal 1371 KUH Perdata memuat ketentuan yang mengatakan bahwa: “Penyebab luka-luka atau cacat sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban, untuk selain pengganti biaya-biaya penyembuhan, menurut pengganti kerugian yang disebabkan oleh luka-luka atau cacat tersebut”.

Jadi seseorang dengan sengaja atau kurang hati-hati oleh karena terjadinya luka-luka atau cacat pada badan orang lain, maka ia berkewajiban untuk memberi ganti kerugian, dan menimbulkan kerugian hanya diberikan kepada korban. Undang-undang memang menentukan biaya-biaya perawatan sehingga sampai sembuh, dan biaya-biaya perawatan harus dapat diperhitungkan. Jadi semua pengeluaran yang layak diperlukan sedapat mungkin untuk biaya penyembuhan keadaan jasmani pada terjadinya suatu peristiwa. Dengan demikian karena kesedihan dan kehilangan kesenangan hidup merupakan kerugian *immateriil* dapat diberikan ganti kerugian berupa *materiil*, hal ini dapat di lihat di dalam keputusan *Hoge Raad* tanggal 21 Mei 1943, di mana Pasal 1371 KUH Perdata dapat dipertimbangkan kerugian *idiil* sehingga hakim dapat menentukan untuk kesediaan dan kesenangan hidup yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmati.

²⁸ *Ibid*, hal. 162

Bahkan sering terjadi seseorang telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, akibat dari perbuatan ini orang lain menderita kerugian dan pihak yang dirugikan sudah merasa puas apabila pelanggar hukum dijatuhi hukuman pidana, dan pihak yang dirugikan tidak akan mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, walaupun mungkin masih dapat digugat secara perdata.

Selanjutnya bagaiman seandainya jika terjadi perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang. Kalau perbuatan tersebut dituntut secara pidana, maka alat-alat perlengkapan negara akan turun tangan untuk mengadakan pemeriksaan dan penuntutan di muka pengadilan. Apabila dalam hukum perdata masalah ini timbul dengan adanya gugatan dari keluarga yang ditinggalkan korban, karena matinya orang tersebut, maka keluarga yang ditinggalkan menderita bathin baik berupa kehilangan orang yang dicintai maupun berupa kerugian *materiil*. Untuk meminta pertanggungjawabannya atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang dapat dilihat di dalam Pasal 1370 KUH Perdata yang berbunyi:

Dalam hal suatu pembunuhan dengan sengaja atau kurang hati-hati seorang, maka suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti kerugian kedua belah pihak, serta menurut keadaanya.

Berkenaan dengan Pasal 1370 KUH Perdata di atas, *Hoge Raad* pada kenyataannya pada tanggal 19 November 1943 telah mempertimbangkan:

Bahwa Pasal 1370 BW dalam hal terjadi kematian yang disebabkan dengan sengaja atau yang disebabkan karena kurang hati-hatinya pelaku memberi peraturan khusus tentang orang-orang pada siapa diberikan

tuntutan ganti kerugian dan mengenai kerusakan yang dapat diberikan ganti kerugian.²⁹

Jadi tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 1370 BW hanya terbatas kepada orang-orang yang berhak menerima ganti kerugian tersebut. Menurut *Hoge Raad* tuntutan berdasarkan pada pasal tersebut bukan ganti rugi, akan tetapi tuntutan *alimentasi* (pemberian keperluan hidup). Kerugian ini hanya diberikan kepada mereka yang memerlukan serta bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan kematian pencari nafkah bagi mereka yang ditinggalkan. Dalam hal penggugat yang menuntut ganti kerugian harus dapat membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum.

Selain apa yang telah diuraikan di atas, dapat juga dilihat tuntutan ganti kerugian atas kerugian immateriil lainnya, yakni putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juli 1972 No. 27 K/Sip/1972, secara singkat sebagai berikut:³⁰

Kejadian ini berpangkal dari iklan di harian Medan dimana penggugat mengartikan iklan tersebut sebagai sesuatu penghinaan dan merusak nama baik seseorang dimuka umum, tetapi tergugat memuat iklan dengan maksud bahwa memutuskan hubungan kerja dengan penggugat dan pemberitahuan lewat iklan demikian adalah lazim dalam dunia perdagangan.

Disamping itu juga penggugat menderita kerugian bathin sebab iklan mungkin sekali menghalang-halangi untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian. Dalam hal ini penggugat yang merasa dirugikan menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1372 jo Pasal 1365 KUH Perdata.

²⁹R. Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 68

³⁰R. Suapomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hal. 60

Pada Pengadilan Negeri tingkata I Pematang Siantar maupun Pengadilan Tinggi Medan dapat membenarkan tuntutan penggantian kerugian *immateriil* adalah:

- a. Pengadilan Negeri dengan putusan tanggal 1 Oktober 1970 No.55/1970/Perd, menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Kemudian terggugat naik banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini.

- b. Pengadilan Tinggi dengan keputusan pada tanggal 22 Juni 1971, No. 51/1971 mengatakan bahwa telah sengaja berbuat mencemarkan nama baik seseorang yang bersifat penghinaan yang menyinggung kehormatan penggugat sesuai dengan kenyataan-kenyataan pembuktian di atas telah jelas membawa akibat langsung berupa kerugian baik *moril* maupun *materiil* kepada penggugat.

Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan karena hubungan kerja antara penggugat dan tergugat diperhitungkan dalam dolar AS, maka jumlah ganti kerugian adalah sebesar \$ 182.000,- (Seratus delapan puluh dua ribu dolar AS). Mengenai permintaan maaf dihadapan hakim tidak penting dan harus ditolaka karena dengan menyebabkan gugatan ganti kerugian telah dipenuhi maksud penggugat. Pengadilan Tinggi Medan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantara yang selebihnya.

Kemudian tergugat asal mengajukan pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam pemeriksaan membenarkan keberatan-keberatan

yang diajukan tergugat asal atau penggugat untuk Kasasi I dan menilai bahwa isi maupun perbuatan yang dipakai dalam yang pokok isinya hanya mengatakan “tidak ada hubungan lagi” tidak dapat dikatakan sebagai penghinaan atau mencemarkan nama baik penggugat asal atau tergugat untuk Kasasi II.

Mahkamah Agung memutuskan:

1. Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I dahulu tergugat asal.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juni 1971, No.51/1971.

Pendapat penulis mengenai pembahasan Yurisprudensi di atas, adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi adalah tepat, alasannya adalah: sesuai dengan apa yang telah diajukan tergugat asal atau penggugat untuk Kasasi I Pengadilan Tinggi Medan, maka segala tindakan yang telah dilakukan oleh tergugat asal atau penggugat untuk Kasasi I adalah pemasangan iklan di Medan merupakan terlaksana keadaan dengan itikad baik tanpa memperhatikan maksud sedikitpun untuk melakukan penghinaan, atau mencermarkan nama baik tergugat asal atau penggugat untuk Kasasi II. Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa tujuan pemasangan iklan hanya sebagai *prevensi* yang menyolok (dalam arti menarik perhatian).

B. Kriteria Menentukan Besarnya Ganti Rugi Terhadap Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melanggar Hukum

Mengenai kriteria untuk menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immaterial adalah hakim wajib memperhatikan sifat kedudukan serta kemampuan kerugian keuangan dari kedua belah pihak. Sehingga atas dasar ada kerugian-kerugian pada perbuatan seorang pelaku yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat diminta pertanggungjawaban. Dalam menentukan besarnya ganti rugi perlu ditetapkan nilai nominal yang sering dipergunakan, sebab ganti rugi dalam nominal ini nilainya harus dibatasi dan mudah dilaksanakan, sedangkan dalam bentuk pengembalian semula biasanya terletak dalam hak kebendaan atau kepentingan terhadap harta kekayaan.³¹ Seperti dalam contoh sebagai berikut. Ada seorang tukang batu bernama Gerenio, berkebangsaan Italia dan bekerja di Amerika. Ia menikah dengan seorang perempuan berkebangsaan Italia yang bernama Anazeta. Kepada Anazeta dikatakan oleh Gerenio bahwa ia mendiami rumah sendiri. Alangkah kecewanya Anazeta, ternyata Gerenio sama sekali tidak mempunyai rumah sendiri. Akan tetapi tidak mengapa suami dan isteri akan berusaha sekuat tenaga dengan cara menyimpan uang sedikit demi sedikit supaya dikemudian hari dapat membeli rumah. Namun penghematan mereka meskipun sudah dilakukan susah payah tidak berhasil oleh karena kemudian lahir berturut-turut empat orang anak., yang tentunya memerlukan pengeluaran lebih banyak, seiring berjalannya waktu terjadi krisis perekonomian yang menyebabkan pengangguran, maka harapan untuk

³¹Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 98

dapat membeli rumah makin lama makin berkurang. Oleh karena cita-cita masih jauh dimata, maka sering terjadi pertengkaran antara suami isteri, kemudian membaik kembali dan harapan besar bahwa cita-cita tersebut akan tercapai, pada waktu Gerenio mendapat pekerjaan membuat rumah orang lain selaku tukang batu. Tetapi malang nasib Gerenio terjadi kecelakaan, dan akhirnya meninggal dunia.

Kemudian ternyata, pemerintah memberikan ganti kerugian kepada Anazeta berupa uang pensiun ditambah dengan uang tunai 1000 dollar: uang tunai ini cukup untuk membeli rumah. Dengan tercapainya cita-cita Anazeta yang selalu diharapkan dengan mencurahkan segenap tenaga, akan tetapi Anazeta meskipun cita-cita sudah tercapai timbul kesedihan karena kehilangan Gerenio suaminya. Pada uraian di atas, maka dapat menggambarkan hal seorang dapat membayar sejumlah ganti kerugian.³² Adalah hal lain dari pada seorang berwajib membayar sejumlah uang ganti kerugian. Kalau seorang hakim memutuskan mewajibkan ganti kerugian, kewajiban ini dengan sendirinya tidak dapat dipenuhi, kalau seorang yang diwajibkan tidak mampu membayar sejumlah uang itu. Keluwesan KUH Perdata masih dilanjutkan lagi dan memuncak pada ketentuan bahwa jumlah ganti kerugian itu harus ditetapkan dengan mengingat keadaan.

Seperti Pasal 1370 dan Pasal 1371 KUH Perdata berhubungan bentuk jumlah ganti kerugian dari kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak adalah yang merugikan dan dirugikan bergantung pada keadaan.

³²*Ibid*, hal. 99

Dalam hubungan pasal tersebut menentukan ukuran pada umumnya berlaku untuk menghargai kerugian yang disebabkan oleh kejahatan terhadap seseorang, tidak hanya oleh kekayaan, yang tidak berakibat suatu luka-luka atau cacat badan. Dalam kejahatan-kejahatan semacam ini sudah nyata ketiadaan menimbulkan kerugian yang bersifat kebendaan, melainkan hanya menimbulkan kerugian dalam lapangan kesusilaan. Tetapi KUHP memakai ukuran kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pandangan KUH Perdata yang menimbulkan kerugian di lapangan kesusilaan dapat diganti dengan uang atau benda lain. Namun demikian menurut penulis tergantung dari pandangan seseorang terhadap korban. Ukuran objektif amat sulit diberikan, kalau hakim mengatakan dapat menemukan ukuran objektif, ini sebetulnya ukuran subjektif dari hakim sendiri.

Namun demikian hakim dalam memutuskan besarnya nominal ganti kerugian terhadap kerugian immaterial terhadap perbuatan melanggar hukum disesuaikan dengan Pasal 1246 KUH Perdata tentang ganti rugi terdiri dari tiga unsur, yakni:

- a. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan misalnya: biaya cetak, biaya materai, dan biaya iklan.
- b. Menimbulkan kerugian karena kehilangan jiwa seseorang diakibatkan melanggar hukum. kerugian disini yaitu sungguh-sungguh yang diderita.
- c. Pada keuntungan yang diharapkan karena pihak itu lalai, sedang pihak lain kehilangan keuntungan yang diharapkan. Misalnya A akan menerima beras sekian ton dengan harga pembelian Rp 25.000,- per kilogram.

Kemudian A menawarkan kepada B dengan harga Rp 27.000,- per kilogram. Setelah perjanjian dibuat. Disini A kehilangan keuntungan yang diharapkan.

BAB. IV

P E N U T U P

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Cara membuktikan terjadi kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum adalah: dengan cara melihat dari adanya hubungan kausal antara kesalahan dan menimbulkan kerugian. Bersumber pada semua unsur-unsur yang dilakukan oleh pelaku antara lain penggugat harus membuktikan adanya kerugian dan kesalahan pelaku, karena gugatan berdasarkan atas perbuatan melanggar hukum, penggugat harus membuktikan gugatannya.
2. Kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum adalah: pada hakikatnya didasarkan atas kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Artinya besarnya ganti rugi tersebut diserahkan kepada hakim yang memeriksa perbuatan melanggar hukum tersebut.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada hakim untuk membuktikan tentang terjadinya kerugian immaterial selain adanya hubungan kausal antara kesalahan yang

menimbulkan kerugian, juga kebebasan hakim sangat berperan dalam membuktikan kesalahan yang menimbulkan kerugian immaterial, untuk itu dibutuhkan hakim-hakim yang professional dan cerdas, agar pebuktian dari kesalahan tersebut benar-beñar sesuai dengan harapan.

2. Perlu ditetapkan kriteria yang ideal dalam menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immaterial dalam perbuatan melanggar hukum, agar dapat dirasakan adil antara para pihak pelanggar maupun yang dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achamad ichsan, *hukum Perdata I. B*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1997
- AB Loebis, *Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum dan Penguasa*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- MA. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Praja Paramita, Jakarta, 1992
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999
- , *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1992
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1996

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

OUT LINE SKRIPSI

CARA MEMBUKTIKAN TERJADINYA KERUGIAN IMMATERIL DAN KRITERIA DALAM MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI TERHADAP KERUGIAN DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Permasalahan :

1. Bagaimana cara membuktikan terjadinya kerugian immateril dalam perbuatan melanggar hukum?
2. Bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateril dalam perbuatan melanggar hukum?

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II TIJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum
- B. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum
- C. Macam-macam Kerugian
- D. Pertanggung Jawaban Atas Perbuatan Melanggar Hukum Orang Lain

BAB III PEMBAHASAN

- A. Cara Membuktikan Terjadinya Kerugian Immateril Dalam Perbuatan Melanggar Hukum
- B. Kriteria Menentukan Besarnya Ganti Rugi Terhadap Kerugian Immateril Dalam Perbuatan Melanggar Hukum

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didik Ismail
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuasin III , 06 Juni 1993
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
NIM : 502011164
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi yang berjudul:

CARA MEMBUKTIKAN TERJADINYA IMMATERIL DAN KRITERIA DALAM MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI TERHADAP KERUGIAN DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 04 Maret 2015

Yang Menyatakan,



Didik Ismail

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Didik Ismail
Nim : 50 2011 164
Program Study : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Cara membuktikan terjadinya kerugian immaterial dan kriteria dalam menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian dalam perbuatan melanggar hukum

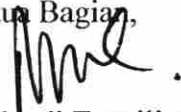
I. Rekomendasi Ketua Bagian : Hukum Perdata

a. Rekomendasai

b. Usulan Pembimbing

: 1. *MUR. HUSNI. GULISA. SH. SP.A*
2.

Palembang, ~~0~~Maert 2015
Ketua Bagian,


Mulyadi Tanzili, SH., M.H

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan. I

1. *Nur Han-Earlson. SH- Sp. O. R.H.*

2.

Palembang, ~~1~~ Maert 2015
Wakil Dekan. I


Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ibu Heni Marlina,SH., MH
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
di –
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Didik Ismail
Nim : 50 2011 164
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester Ganjil kuliah 2014/2015 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKKK, MKB, MPB, MBB (130 sks).

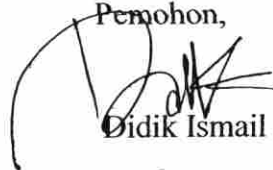
Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul: "Cara membuktikan terjadinya kerugian immaterial dan kriteria dalam menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian dalam perbuatan melanggar hukum"

Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Palembang, 01 Maret 2015

Pemohon,



Didik Ismail

Rekomendasi PA, Ybs:

Sudah Memenuhi Syarat Untuk Menulis Skripsi

Pembimbing Akademik,



Heni Marlina, SH., MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Didik Ismail

NOMOR POKOK : 502011164

JURUSAN : Ilmu Hukum

PROG. KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing:

NUR HUSNI EMILSON, SH.,
Sp.N., MH

JUDUL SKRIPSI : CARA MEMBUKTIKAN TERJADINYA KERUGIAN IMMATERIL DAN KRITERIA DALAM MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI TERHADAP KERUGIAN DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1.	ke. judul	H/3/15	
2.	perdata. Bab. I.	H/12/315	
3.	ke. Bab. I. (sel lho Ugin)	H/6/9/15	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
4.	Buat Bab. II,	HP 7/5/15	
5	Perbaikan Bab. II sesuai petunjuk	HP 17/5/15	
6.	Ace. Bab II, buat Bab. III & IV	HP 21/5/15	
7	Perbaikan Bab. III & IV	HP 11/6/15	
8.	Ace. Bab. III & IV buat Absen. dll.	HP 20/6/15	
9.	Ace. seluruh perbaikan untuk ujian	HP 27/7/15	

CATATAN:

MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
..... BLN SEJAK TGL.
DIKELUARKAN / DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DIPALEMBANG

PADA TANGGAL : 10-8-2015

Ketua Bagian Hukum Perdata


MULYADI TANZILI, SH., MH